

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Gejolak politik yang terjadi di Myanmar, amat disoroti dalam pemberitaan dunia internasional. Sistem pemerintahannya yang dipertahankan selama puluhan tahun yakni junta militer, dianggap sudah tidak mampu lagi menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama masalah perekonomian, konflik etnis, dan keterlibatan militer yang terlampau jauh dalam politik. Selain itu, masyarakat sipil dibatasi untuk melakukan perkumpulan dan mengeluarkan pendapat, khususnya dalam mengkritisi keputusan pemerintah, sehingga tentara pemerintah banyak diturunkan untuk melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang mencoba melakukan upaya tersebut.

Pemerintahan junta militer di Myanmar diberlakukan sejak tahun 1962 setelah Jenderal Ne Win melakukan kudeta terhadap U Nu yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Burma (sebelum berganti nama menjadi Myanmar). Kudeta yang dilakukan berdampak pada sistem pemerintahan yang segala halnya diatur oleh militer. Myanmar semakin tertutup dari dunia luar dengan semboyan yang dikeluarkan Ne Win “Jalan Burma (Myanmar) Menuju Sosialisme”. Perubahan nama Myanmar sendiri dibentuk oleh pemerintah junta militer SLORC (*State Law and Order Restoration Council*) pada tahun 1989 dengan alasan ingin membebaskan Myanmar dari sejarah kelam kolonialisme penjajahan Inggris dan meningkatkan rasa nasionalisme seluruh suku bangsadi bawah persatuan negara Myanmar (Col, 2005: 7).

Selama puluhan tahun pemerintahan junta militer menjabat, kehidupan rakyat Myanmar tidak mendapatkan kesejahteraan seperti yang dijanjikan oleh para pemimpinnya. Ekonomi Myanmar semakin memburuk di bawah pemerintahan junta militer dengan sistem politik partai tunggal dan ideologi sosialisme yang diusungnya. Harga bahan bakar minyak melambung tinggi, korupsi di kalangan pejabat

pemerintah junta militer, dan pertanian Myanmar yang menurun menyebabkan kemiskinan semakin bertambah. Dengan tidak selesainya permasalahan-permasalahan tersebut, rakyat Myanmar menganggap bahwa pemerintahan junta militer sudah tidak layak lagi untuk bertahan lebih lama. Puncak dari segala kekecewaan rakyat ditumpahkan dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan “*Uprising generation 88*” (Kompas, 21 November 2010).

Pada tanggal 8 Agustus 1988, terjadi sebuah peristiwa demonstrasi besar-besaran di Yangon dan kota sekitarnya. Demonstrasi ini dimotori oleh mahasiswa dan didukung oleh biksu serta rakyat Myanmar lainnya menuntut turunya rezim junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Aksi ini hampir serupa dengan peristiwa *people power* di Filipina ketika rakyat beserta Corazon Aquino istri dari Benigno Aquino, berdemonstrasi menuntut atas pembunuhan suaminya oleh oknum rezim Ferdinand Marcos (Munif, 2009: 6). Diikuti pula dengan kekecewaan rakyat terhadap situasi politik, sosial dan ekonomi Filipina yang carut marut di bawah kepemimpinan Marcos.

Aksi yang terjadi di Myanmar, merupakan bukti dari sebuah fenomena sejarah yang berulang dari peristiwa yang terjadi di Filipina. Rakyat Filipina menuntut turunya rezim pemerintah otoriter yang sudah tidak sanggup menyelesaikan permasalahan negara dan menuntut Marcos atas pembunuhan oposisinya, Benigno Aquino. Akhirnya, Marcos tumbang dengan adanya peristiwa *people power* tersebut. Begitupun dengan yang terjadi di Myanmar, hasil dari aksi demonstrasi yang dilakukan di Myanmar pada tahun 1988 berdampak pada kudeta terhadap Jenderal Ne Win, namun belum mampu meruntuhkan rezim junta militer seutuhnya.

Peristiwa demonstrasi tersebut dibalas oleh tentara pemerintah yang dipimpin oleh Sein Lwin yang dikenal sebagai “*The Butcher of Rangoon*” atau “Penjagal dari Burma”. Tentara pemerintah atau yang disebut dengan *Tatmadaw* melakukan tindakan kekerasan hingga menembakkan peluru ke arah demonstran yang mengakibatkan terbunuhnya sekitar 3000 jiwa (Makkawaru *et al*, 2006: 255). Peristiwa ini yang mendorong seorang wanita bernama Aung San Suu Kyi untuk

turun tangan karena prihatin atas penindasan yang tidak seharusnya dilakukan kepada rakyat yang menginginkan perubahan.

Melihat kondisi rakyat Myanmar yang tidak kunjung mendapatkan kesejahteraan, baik secara ekonomi maupun sosial yang dipimpin oleh sistem politik yang diterapkan pemerintah junta militer, Aung San Suu Kyi yang juga kerap disapa dengan Suu atau Suu Kyi merasa tergerak untuk melakukan gerakan menuntut perubahan dan kebebasan mengusung tema demokrasi. Gerakannya memperjuangkan demokrasi terilhami dari cita-cita Aung San yang tidak lain adalah ayahnya yang merupakan orang yang berjasa dalam militer dan pahlawan kemerdekaan Myanmar, serta terinspirasi dari pemikiran Mahatma Gandhi yang terkenal dengan konsep *Ahimsa*, yakni ajaran menolak kekerasan.

Pemikiran Gandhi (Mehta, 2002: 244) adalah apabila kekerasan dibalas dengan kekerasan hanya akan melahirkan kebencian. Gandhi mengajarkan pada pentingnya memperjuangkan sesuatu berdasarkan kebenaran atau yang disebut dengan satyagraha. Ini merupakan metode untuk meraih hak-hak melalui perjuangan dengan cara menanggung penderitaan pribadi, yang bertentangan dengan perlawanan menggunakan senjata. Selanjutnya, perjuangan juga harus berada di jalan yang benar dan bermoral.

Setelah melihat kejadian demonstrasi yang dibalas dengan aksi anarkis tentara pemerintah, Suu Kyi melakukan upaya gerakan demokrasi pertamanya dengan mengirim surat terbuka kepada pemerintah junta militer pada tanggal 15 Agustus 1988. Surat tersebut berisi permintaan untuk diadakan susunan Komite Konsultatif Independen untuk pemilu multipartai. Sebelumnya, Jenderal Ne Win (Aung, 1993: 269) menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya dan akan mengadakan Referendum Nasional, serta menanyakan kepada pihak partai tentang harus diadakan atau tidakkah sistem multipartai.

Mendengar pernyataan yang dikeluarkan oleh Jenderal Ne Win, Suu Kyi membentuk partai NLD (*National League for Democracy*) dan terpilih sebagai Sekretaris Jenderal dari partai tersebut. Ia dipercaya oleh orang-orang pro-demokrasi

Myanmar dapat memberikan perubahan yang berarti bagi demokratisasi kehidupan politik di Myanmar. Walaupun tidak dapat dipungkiri peran sosok ayahnya, Aung San mempengaruhi kepopuleran Suu Kyi. Gebrakannya di depan publik dimulai pada tanggal 26 Agustus 1988, dengan melakukan orasi di depan Pagoda Shwedagon yang dihadiri ratusan ribu orang dari berbagai kalangan dan profesi (Makkawaru *et.al*, 2006: 255).

Selain itu, untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan mencari dukungan lebih kuat bagi gerakannya, Suu Kyi tidak hanya melakukan orasi di daerah kota seperti Yangon dan Mandalay, tetapi juga melakukan kunjungan dan kampanye ke daerah-daerah pelosok Myanmar untuk bertemu dengan suku-suku pribumi di wilayah perbatasan. Menurutnya, demokrasi hanya akan berjalan jika semua rakyat ikut bergabung (Clements, 1997:61). Tidak pernah terpikirkan oleh dirinya bahwa ialah orang yang memainkan peran penting dalam memperjuangkan demokrasi, namun posisinya merupakan bagian yang sama seperti rakyat lainnya yang ikut melakukan gerakan perubahan.

Gerakan yang dilakukan oleh Suu Kyi dan pengikutnya tersebut memenangkan partai NLD di pemilu yang diadakan pada tahun 1990. Partai NLD memperoleh suara sebesar 80,82 persen dan menang mutlak dari partai SLORC pemerintah junta militer. Tetapi, hasil pemilu ini diabaikan oleh pemerintah dan sebelumnya dilakukan penahanan terhadap Suu Kyi di bawah status tahanan rumah. Rekan-rekan politiknya dan beberapa mahasiswa juga dijabloskan ke dalam penjara. Penahanan terhadapnya dilakukan pemerintah dengan tuduhan bahwa Suu Kyi merupakan biang dari segala ketidakstabilan di Myanmar dan pemberi dogma pemikiran Barat yang *liberal*. Ang Chin Geok (1998, 50) mengatakan bahwa Ne Win sebenarnya sangat tidak menyukai hal-hal yang berbau Barat, sehingga kekhawatirannya sudah muncul sejak Suu Kyi kembali ke Myanmar pada tahun 1988.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk menulis kajian mengenai gerakan demokrasi yang dilakukan oleh Suu Kyi, karena terdapat kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam tema penelitian ini. *Pertama*, karena

pemerintahan junta militer banyak melakukan tindakan keras dan represif kepada rakyat yang mencoba melakukan protes terhadap pemerintahannya yang dianggap sudah tidak layak lagi bertahan lebih lama. Bersamaan dengan munculnya sosok Suu Kyi yang memperjuangkan demokrasi tanpa menggunakan kekerasan di Myanmar, di mana sebuah Negara yang pemerintahannya sangat tidak toleran terhadap demokrasi.

*Kedua*, kesenjangan terjadi saat pemerintah junta militer mengabaikan hasil pemilu yang dimenangkan oleh partai NLD, sehingga banyak anggota-anggota NLD yang ditangkap dan dipenjara, termasuk Suu Kyi yang dikenai status tahanan rumah. Suu Kyi harus menetap di Myanmar dan merelakan waktu berharga dengan keluarganya dihabiskan dan dipisahkan oleh pemerintah untuk tetap memperjuangkan demokrasi di Myanmar, serta bagaimana dampak dari gerakan yang dilakukan Suu Kyi dan orang-orang yang mendukungnya terhadap masa depan demokrasi di Myanmar.

Melihat permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti gerakan demokrasi yang dilakukan oleh Suu Kyi yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan dan memposisikan dirinya sebagai oposisi pemerintah junta militer. Selain itu, masih kurangnya kajian mengenai Aung San Suu Kyi ataupun Myanmar yang dibahas dalam sebuah skripsi, sehingga peneliti memilih judul “Peranan Aung San Suu Kyi dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar Tahun 1988-2012”.

Pemilihan judul dimulai dari tahun 1988, ketika Suu Kyi untuk pertama kalinya datang kembali ke Myanmar, karena sejak tahun 1960 Suu Kyi mulai berpindah-pindah ke luar negeri. Pada tahun 1988 pula, gerakannya menuntut kebebasan dan perubahan dengan mengusung tema demokrasi mulai dilakukan di Myanmar. Suu Kyi dibebaskan untuk ketiga kalinya dari status tahanan rumah pada tahun 2010 dan dapat berkunjung ke luar negeri tanpa dilarang kembali ke Myanmar. Penelitian ini dibatasi sampai tahun 2012, tahun ketika Suu Kyi dan anggota partai NLD lainnya memenangkan pemilu dan mendapat kursi di parlemen, sehingga proses demokratisasi di Myanmar semakin terbuka lebar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses Gerakan Aung San Suu Kyi untuk memperjuangkan demokrasi di Myanmar tahun 1988-2012?”. Maka dari itu, peneliti membatasi masalah dengan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana kondisi sosial dan politik Myanmar pada masa pemerintahan junta militer?
2. Bagaimana upaya Aung San Suu Kyi dalam melakukan gerakan demokrasi di Myanmar?
3. Mengapa pemerintahan junta militer melarang gerakan demokrasi yang dilakukan Aung San Suu Kyi?
4. Bagaimana dampak dari gerakan demokrasi yang dilakukan Aung San Suu Kyi terhadap kehidupan sosial dan politik Myanmar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi sosial dan politik Myanmar pada masa pemerintahan junta militer
2. Menjelaskan upaya Aung San Suu Kyi dalam melakukan gerakan demokrasi di Myanmar
3. Menjelaskan alasan pemerintahan junta militer melarang gerakan demokrasi yang dilakukan Aung San Suu Kyi
4. Mendeksripsikan dampak dari gerakan demokrasi yang dilakukan Aung San Suu Kyi terhadap kehidupan sosial dan politik Myanmar

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses dari perjuangan demokrasi yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi di Myanmar pada tahun 1988-2012.
2. Menambah pengetahuan tentang gejolak sosial dan politik yang terjadi di Myanmar.
3. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang sejarah kawasan, khususnya Asia Tenggara dan Myanmar serta biografi tokoh Aung San Suu Kyi yang berperan dalam memperjuangkan demokrasi di negara rezim junta militer Myanmar.
4. Sebagai perluasan materi di kelas XII jurusan IPS dengan Standar Kompetensi “Menganalisis Perkembangan Sejarah Dunia sejak Perang Dunia II sampai Perkembangan Mutakhir” serta Kompetensi Dasar “Menganalisis Perkembangan Sejarah Dunia dan Posisi Indonesia di Tengah Perubahan Politik dan Ekonomi Internasional setelah Perang Dunia II sampai dengan Berakhirnya Perang Dingin”. Pada masa tersebut mulai dikenal ideologi-ideologi yang mempengaruhi negara-negara di dunia. Pengaruhnya juga masuk ke Indonesia dan Myanmar yang sama-sama merupakan negara berkembang, sehingga penelitian sejarah kawasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat mencakup dalam pembahasan materi dalam SKKD tersebut. Bagi kehidupan sekolah serta para peserta didiknya, diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan dalam perjuangan yang dilakukan Aung San Suu Kyi, seperti disiplin, pantang menyerah, kerja keras dan tetap memakai jalan tanpa kekerasan dalam memperjuangkan demokrasi bersama rakyat Myanmar.

### **1.5 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah yang memang sudah lumrah digunakan dalam penelitian ilmu sejarah. Metode sejarah ini juga disebut dengan metode historis. Gottschalk (1983: 32) mengungkapkan bahwa, metode historis merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis, rekaman dan peninggalan

masa lampau. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengujian dan analisis terhadap sumber-sumber yang sesuai dengan tema yang akan dibahas.

Menurut Ismaun (2005: 23), metode historis memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan agar proses menguji dan menganalisis fakta dapat tercapai. Berikut langkah-langkah dalam penelitian sejarah:

1. Heuristik merupakan kegiatan menghimpun dan mengumpulkan sumber-sumber atau jejak masa lalu yang diperlukan untuk bahan penelitian. Upaya-upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber atau data-data yang berkaitan seperti mendatangi berbagai perpustakaan dan mencari atau membeli buku-buku yang berkaitan dengan bahasan, atau jika memungkinkan dicari pula sumber lisan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber tertulis, dikarenakan sumber lisan untuk kajian peneliti agak sukar untuk diperoleh dan peneliti memiliki beberapa keterbatasan untuk melakukannya. Sumber lisan untuk mewawancarai tokoh yang dibahas berada di negara yang berbeda dengan peneliti, yakni di Myanmar.
2. Kritik Sumber merupakan kegiatan menyelidiki, menguji dan menilai keaslian jejak-jejak atau data sesuai dengan masanya. Kritik sumber ada dua aspek, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Tujuan dari kegiatan ini adalah bahwa setelah penulis berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, peneliti tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis di sumber-sumber yang dapatkan itu.
3. Interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan dari pemahaman atas sumber-sumber yang digunakan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menafsirkan fakta dan data, dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ditulis oleh para ahli atau penulis yang kajiannya berhubungan dengan Aung San Suu Kyi dalam memperjuangkan Demokrasi di Myanmar tahun 1988-2012.
4. Historiografi adalah penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahapan terakhir dari penelitian sejarah. Dalam kajian ini, peneliti akan menyusun hasil temuannya

ke dalam bentuk tulisan yang menggunakan tata bahasa yang jelas dan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan yang baik dan benar.

## 1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi dalam penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti mengenai Peranan Aung San Suu Kyi dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar tahun 1988-2012. Di dalamnya, terdapat penjelasan ketertarikan peneliti untuk menulis tema atau judul tersebut. Agar permasalahan yang dikaji tidak melebar, maka peneliti memfokuskannya ke dalam rumusan masalah. Selain itu, terdapat sub bab manfaat dan metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian, lalu di bagian akhirnya terdapat struktur organisasi skripsi yang menjadi kerangka atau pedoman penulisan dalam skripsi ini.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka mengenai buku-buku atau sumber penelitian lainnya yang berkaitan dengan Peranan Aung San Suu Kyi dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar tahun 1988-2012, serta landasan berpikir penelitian berupa konsep-konsep atau teori yang relevan dengan tema yang diangkat. Selain itu, terdapat pemaparan penelitian terdahulu yang berisi sumber-sumber penelitian yang terdiri dari jurnal, skripsi maupun buku.

Bab III Metode Penelitian dalam bab ini dijelaskan mengenai metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode historis atau metode sejarah. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan interdisipliner yang dibantu dengan ilmu lainnya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan ilmu bantu politik dan sosiologi untuk menunjang penelitiannya. Proses penelitian disesuaikan dengan Pedoman Penelitian Karya Ilmiah UPI dan berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Bab IV Aung San Suu Kyi dan Gerakan Demokrasi di Myanmar Tahun 1988-2012, dalam bab ini peneliti akan menguraikan seluruh hasil penelitian yang

dilakukan berdasarkan pada data dan fakta yang diperoleh selama penelitian dilakukan mengenai tema yang peneliti kaji.

Bab V Kesimpulan, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ditanyakan.

